

BAB IV

PENUTUP

IV.1 KESIMPULAN

Pada beberapa tahun terakhir Indonesia perlu mengimpor sekitar 3 juta ton beras setiap tahunnya, terutama dari Vietnam, untuk mengamankan cadangan beras negara. Impor ini dilaksanakan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog). Badan ini memiliki monopoli untuk impor dan ekspor beras, berhubungan dengan proses distribusi dan menjaga stabilitas harga beras di Indonesia. Pada 2011 dinyatakan terdapat surplus 3.9 juta ton yaitu perbedaan produksi 36.9 juta ton dan konsumsi 33 juta ton. Pada 2012 ada surplus 5.8 juta ton, dari perbedaan produksi 38.8 juta ton dan konsumsi 33 juta ton. Pada 2013 akan diperoleh surplus 5.9 juta ton yaitu pengurangan produksi 38.9 juta ton dan konsumsi 33 juta ton. Pada 2014 akan surplus 10 juta ton jika produksi 43 juta ton dan konsumsi 33 juta ton. Semua diperoleh dengan mengurangi produksi beras dan jumlah konsumsi beras kapita. Dengan demikian, merujuk pada hasil perhitungan tersebut sebenarnya surplus beras yang setiap tahunnya naik.

Sementara itu pendapat BULOG tidak dibenarkan oleh beberapa pihak yang tidak setuju dengan kebijakan impor seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa kebijakan impor beras yang diusung pemerintah mencerminkan kinerja minimalis dalam usaha meningkatkan produksi. Adanya Kebijakan Impor Beras di Indonesia pada masa awal hingga pertengahan Orba, yakni antara periode 1970 – 1980an, produksi beras di Indonesia cukup bagus. Bahkan, tahun 1984 telah mengalami swasembada beras. Kondisi ini terjadi karena kinerja pemerintah yang sinergis dengan berbagai pihak seperti produsen padi, distribusi padi dan konsumen beras, sehingga distribusi beras dari hulu ke hilir menjadi sistematis. Sementara Kerjasama perdagangan beras antara Indonesia dan Vietnam diadakan pertemuan yang dilakukan di auditorium Kementerian Perdagangan ini telah berlangsung sejak tahun 1984, diawali dengan pertemuan tingkat Pejabat Senior dimana Indonesia diwakili oleh Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Iman Pambagyo. Telah dilaksanakan pada 18 september 1985,

dengan melakukan penandatanganan jangka panjang, Nota Kesepahaman tentang Perdagangan Beras antara kedua Negara. Sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka Penulis menjadikan Pertanyaan Penelitian yang akan Penulis bahas adalah Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam penurunan impor beras Vietnam periode 2015 ? .

Alasan suksesnya Indonesia meraih kondisi swasembada beras dalam rentan waktu yang cukup lama. Perdagangan beras Vietnam sudah dimulai dari tahun 1984. Persetujuan di berbagai bidang yang telah ditandatangani oleh Menteri Perdagangan RI dan Menteri Industri Perdagangan Vietnam. Telah dilaksanakan pada 18 september 1985, dengan melakukan penandatanganan jangka panjang, Nota Kesepahaman tentang Perdagangan Beras antara kedua Negara. Pada intinya adalah adanya komitmen Pemerintah Vietnam untuk memperpanjang masa penyediaan beras kepada Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila sewaktu-waktu Indonesia memerlukan beras, Sejak tahun 1990, kondisi berubah dan memaksa pemerintah untuk menerima kenyataan bahwa Indonesia harus melakukan impor beras.

Hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Vietnam didasarkan pada Persetujuan antara pemerintah RI dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam mengenai kerjasama ekonomi, khususnya pada perpanjangan perdagangan beras yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri kedua negara pada tanggal 21 Nopember 1990. Kemudian, tahun 1996 menjadi salah satu titik tersuram dalam persoalan agricultural di Indonesia khususnya dalam masalah beras. Dasar kerjasama Indonesia-Vietnam di sektor pertanian yaitu telah ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MOU) di sektor pertanian pada tanggal 12 Desember 1992 di Hanoi dengan lebih ditekankan pada pemerintah Vietnam mengusulkan kepada pemerintah Indonesia untuk komoditi yang ditawarkan oleh pihak Vietnam adalah beras, sementara yang diharapkan dan pemerintah Indonesia adalah Pupuk. (Supadi dalam M Ikhsan Modjo, Kajian Monash Indonesian Islamic Student Westall: 2015).

Pada tahun 1998, Terpuruknya perekonomian nasional pada tahun 1998 yang dampaknya masih berkepanjangan hingga saat ini membuktikan rapuhnya

fundamental ekonomi kita yang kurang bersandar kepada potensi sumber daya domestik.

Dalam periode 2000 – 2005, perdagangan beras di dunia memang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Tetapi, disamping itu negara eksportir yang terutama adalah Vietnam. MoU on Rice Trade ini kemudian diperpanjang pada tahun 2009 untuk jangka waktu 2010 – 2012. Kebijakan pemerintah mengenai impor beras menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Banyak yang menolak, disisi lain ada juga yang mendukung. Sedangkan, pada tahun 2007 konsumsi pangan beras semakin menurun. Namun, disisi lain konsumsi pangan karbohidrat non – beras umumnya semakin meningkat. Penurunan konsumsi beras diikuti dengan peningkatan konsumsi pangan karbohidrat non – beras. Kerjasama yang dilakukan dengan Vietnam tersebut dituangkan dalam suatu Memorandum on Rice Trade dengan Vietnam yang disepakati pada tanggal 5 April 2007 untuk masa kerjasama sampai dengan 31 Desember 2009.

Kemudian berbeda dengan pertengahan tahun 2008, harga BBM dunia mencapai puncaknya yaitu hampir \$150 perbarrel dan harga pangan dunia juga mengikuti harga BBM tersebut. Namun, harga beras di Indonesia mengalami gejolak yang relatif kecil dibanding yang terjadi di luar negeri. Gejolak harga pangan di dunia merupakan peringatan bagi negara Indonesia supaya lebih menjaga ketahanan pangan.

Adanya beberapa alasan dalam mengimpor beras, yaitu seputar kekeringan, gagal panen, tingginya harga beras dalam negeri sehingga Bulog tidak sanggup membeli beras dari petani, dan yang terakhir adalah untuk menutupi cadangan beras pemerintah supaya aman dalam beberapa bulan kedepan. Selain itu, salah satu yang merupakan alasan pemerintah mengimpor beras dari Vietnam adalah lantaran cadangan beras Vietnam sangat besar. Dinamika Impor Beras Vietnam, Impor yang dilakukan oleh Indonesia itu dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin ketersediaan stock pangan nasional, agar tidak terjadi krisis pangan di Indonesia yang bisa mengakibatkan dan mengganggu kestabilan nasional.

Semua bentuk kebijakan antara tahun 2012 – 2015 yang berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas beras normal. Pada tahun 2012 ini masih mengimpor beras Vietnam tetapi impor beras pada tahun 2012 yang volume nya hanya 1.900.000ton lebih sedikit dibandingkan setahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena, pada tahun 2012 kebijakan penguatan ketahanan pangan mencakup aspek ketersediaan atau kecukupan, koontinuisitas, distribusi, kualitas, dan keamanan atau kesehatan lebih di kuatkan. Kebijakan perluasan lahan dan perkembangan teknologi di tahun 2013 – 2014, Berbeda dengan tahun 2013 yang volume impor beras nya menurun hingga menjadi 500.000ton. Adanya program – program yang merupakan upaya yang di efektifkan pada tahun 2013 dari kebijakan penurunan impor beras. Kebijakan pengurangan impor beras Indonesia.

Sedangkan pada tahun 2015, penurunan impor yang sangat tajam daripada tahun – tahun sebelumnya hingga mencapai 160.000ton. ini berarti, kegiatan dan program pengembangan produktivitas padi dalam negeri sangat efisien. Kementerian Perdagangan tidak pernah mendatangkan beras impor medium karena stok dalam negeri sudah cukup. Tujuannya adalah Kebijakan yang dipilih pemerintah untuk membuka kran Impor juga mendatangkan kontra di tahun ini. Pada satu sisi, keputusan importasi beras tersebut berlangsung ketika terjadi kenaikan harga beras saat ini. Selain itu, produksi padi dalam negeri dinyatakan cukup, dan masa panen masih berlangsung di banyak tempat. Apabila mereview kembali MOU Vietnam, Vietnam melakukan hal ini karena sejarah, yaitu ketika mereka mengalami kesulitan beras, Indonesia bersedia membantu dengan meminjamkan beras. Kesanggupan pemerintah Vietnam dalam pengadaan beras hingga 1 juta ton per tahun bagi kebutuhan Indonesia telah menjadi isi perpanjangan nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia dan Vietnam. Karena stok yang ada sebesar 39 juta ton sementara kebutuhan nasional sebesar 34 juta ton. Beras medium adalah jenis beras yang juga diproduksi petani lokal dan impor diizinkan jika stok terbatas. Impor beras medium hanya boleh dilakukan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) setelah mendapat izin melalui rapat koordinasi seluruh kementerian terkait.

Pada pertengahan tahun 2014, harga beras medium lebih mahal 64,88% dari beras Thailand 15% dan lebih mahal 53,95% dari Vietnam 15%. Vietnam lebih menarik karena harga berasnya relatif lebih murah dibandingkan Thailand dan didukung MOU pemerintah RI-Vietnam. Nah, di tahun ini juga munculah kebijakan setelah adanya dugaan beredarnya impor beras ilegal dari Vietnam ternyata tidak mengakibatkan merosotnya harga beras eceran. Indonesia memilih negara Pakistan sebagai eksportir beras Indonesia, Kebijakan tersebut masih berlanjut hingga tahun 2015, Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan kemungkinan impor beras dari Pakistan masih sebatas pembicaraan memorandum of understanding (MoU). Penjajakan impor beras dari Pakistan dan India juga dilakukan untuk menambah sumber pasokan. Pemerintah tidak ingin Indonesia bergantung pada 1-2 negara saja. Dengan banyaknya negara pemasok, ada berbagai pilihan beras impor, harga pun menjadi lebih murah karena ada persaingan. Namun sampai saat ini, pihaknya belum menyepakati impor beras dari Pakistan dan India, baru sekedar penjajakan saja. Belum sampai angka dan harga, baru setingkat MoU, Bulog masih mempelajari golongan-golongan beras yang ada dan belum sampai kongkrit secara detail.

IV.2 Saran

Penulis ingin menyarankan kepada pemerintah atau pemegang kebijakan, agar kebijakan impor beras tidak dilanjutkan, karena jelas hal itu dapat mengancam kemandirian pangan dan kesejahteraan bangsa. Untuk itu, perlu rencana dalam merevisi kebijakan impor beras dan digantikan dengan kebijakan penguatan sektor pertanian dan pengadaan pangan lokal. Penulis merasa bahwa, Indonesia memiliki potensi yang melimpah ruah dalam bidang pangan dan dapat memanfaatkan potensi yang ada untuk meningkatkan ketahanan dan ketersediaan pangan nasional yang berkelanjutan demi kepentingan rakyat sebesar – besarnya. Dengan catatan Indonesia harus menerapkan manajemen perberasan nasional yang berbasis pada 3 pilar penting, yaitu Revitalisasi, Diversifikasi, dan Reformasi Bulog.

Revitalisasi ini merupakan upaya yang bersifat membangun sektor hulu pertanian yaitu dalam hal peningkatan produksi beras. Langkah ini dilakukan melalui

berbagai macam cara seperti Reformasi sistem lahan, teknologi, dan peningkatan alokasi anggaran pertanian. Reformasi sistem lahan ini berarti, keberpihakan pemerintah untuk memfasilitasi lahan kepada petani. Hal ini bisa dilakukan dengan cara pemberian insentif bagi petani, untuk memili lahan dan memudahkan dalam pengurusan sertifikasi lahan.

Reformasi sistem lahan ini berarti adanya penguatan regulasi untuk lahan pangan berkelanjutan yang berupa sanksi dan standart yang jelas dalam teknis nya tidak hanya sebatas instruksi. Dengan penguatan ini, akan mudah untuk meminimalisasi alih fungsi lahan yang semakin meningkat jumlahnya.

Dalam hal teknologi, yang perlu dilakukan adalah menerapkan teknologi yang tepat guna untuk mendorong produktivitas. Misalnya, penggunaan teknologi yang dinamakan Bioporforasi yang di klaim dapat meningkatkan produktivitas sampai 2 – 3 kali lipat (LIPI,2010). Bioperforasi ini memanfaatkan mikroba unggul yang dapat menyuburkan tanah. Dengan teknologi ini, apabila petani biasanya menggunakan pupuk kompos 1 hektar sebanyak 4 – 6 ton, dengan pupuk ini cukup menggunakan 500 kg.

Dalam hal anggaran pertanian, hal terakhir ini menjadi prioritas utama dalam mendukung Revitalisasi pertanian. Alokasi pertanian yang hanya sebangsa Indonesia 2% perlu di tingkatkan menjadi minimal 5% agar program – program pertanian dapat lebih mudah dilakukan. Peningkatan anggaran ini nantinya juga bisa dimanfaatkan melalui insentif untuk diberikan kepada petani baik dalam bentuk keuangan, infrasturktur maupun pengembangan kompetensi petani. Langkah selanjutnya adalah diversifikasi yang berarti melakukan beranekaragaman makanan selain beras. Diversifikasi ini, digunakan untuk mengurangi konsumsi beras nasional yang saat ini tergolong tinggi.

Potensi untuk melakukan diversifikasi pangan sebenarnya terbuka dengan luas yang mengingat beragamnya potensi hasil pertanian yang bisa sebagai subsitusi produk beras seperti singkong, jagung, sagu, dan berbagai macam produk lainnya. Pemerintah memiliki peranan vital dalam rangka usaha ini, yaitu melalui

sosialisasi ke berbagai daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan keanekaragaman ini.

Dengan keragaman sumber bahan pangan yang dikonsumsi diharapkan dapat menekan impor pangan secara nyata dan mengurangi ketergantungan pangan dari luar negeri sehingga ketahanan dan kemandirian pangan nasional semakin tercapai.

Ketiga adalah Reformasi Bulog, dalam hal ini di khususkan pada penguatan fungsi dari Bulog. Penguatan ini akan memperbaiki sektor tengah dan hilir beras yaitu menyangkut perdagangan dan stok cadangan beras. Secara nyata penguatan ini difokuskan pada peningkatan peran Bulog untuk menstabilkan harga beras, mengoptimalkan penyerapan beras petani, dan menjaga stok pangan nasional, dibandingkan pada upaya untuk menghasilkan keuntungan. Langkah yang dilakukan dengan cara menguatkan regulasi mengenai hal itu yang memberikan kewenangan lebih pada Bulog. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan antara fungsi pelayanan sosial dengan kepentingan komersial yang diemban. Selanjutnya, dari segi manajemen pengolahan stok, Bulog juga perlu mengoptimalkan perannya. Penyerapan beras petani harus lebih aktif dilakukan, serta untuk harga pembelian beras perlu disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku tidak hanya bergantung HPP. Hal ini akan membuat stok Bulog semakin mantap dan petani pun dapat mengambil keuntungan.